

Banjir Jambi 1955 dan redupnya peran Sungai Batanghari

The 1955 Jambi flood and the decreasing role of the Batanghari River

M. Taofik Kurohman^{a*}, Hilma Rosdiana^b
Mtk17072000@gmail.com^a, Hilma.rosdiana@ui.ac.id^b

^{ab}Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding email: mtk17072000@gmail.com

ARTICLE INFO

Received: September 09, 2023

Revised: December 06, 2023

Accepted: December 20, 2023

Published: December 31, 2023

Permalink/DOI

10.17977/um020v17i22023p183-197

Copyright © 2023.

Sejarah dan Budaya

Email: jsb.journal@um.ac.id

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

How to Cite APA Style:

Kurohman, M. T., & Rosdiana, H. (2023). Banjir Jambi 1955 dan redupnya peran Sungai Batanghari. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 1(2), 183-197. <https://doi.org/10.17977/um020v17i22023p183-197>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

ABSTRACT

The objectives of this study are to explain the history of the ecological relationship between the Jambi people and the Batanghari River, explain the changes in the ecological relationship between the Batanghari River and the Jambi people, and explain the impact of the 1955 flood in Jambi. This research was studied using primary and secondary historical sources. The method used is the historical method, through the process of heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The biggest flood recorded and remembered in the collective memory of the Jambi people occurred in 1955 and caused many losses, 80 percent of Jambi was submerged by floods. Flooding in Jambi occurred due to ecological changes along the Batanghari Riverbank that had been going on massively since the colonial period until the Republic. Approximately 350,000 people were affected by the floods, and in some areas the flood level reached four meters. Because of this ecological damage, flooding has become an annual disaster in Jambi.

KEYWORDS

flood; Jambi; ecology; Batanghari River

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah, menjelaskan sejarah dan hubungan ekologis masyarakat Jambi dan Sungai Batanghari, menjelaskan perubahan hubungan ekologis Sungai Batanghari dan masyarakat Jambi, dan menjelaskan dampak dari banjir di Jambi tahun 1955. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan sumber-sumber sejarah primer dan sekunder. Metode yang digunakan adalah metode sejarah, melalui proses heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Banjir terbesar yang tercatat dan terekam dalam memori kolektif rakyat Jambi terjadi pada tahun 1955 dan menimbulkan banyak kerugian, 80 persen wilayah Jambi terendam oleh banjir. Banjir di Jambi terjadi karena perubahan ekologis di sepanjang bantaran Sungai Batanghari yang telah berlangsung masif sejak masa kolonial hingga Republik. Masyarakat yang terdampak banjir kurang lebih 350.000 jiwa, di beberapa daerah ketinggian banjir mencapai empat meter. Karena kerusakan ekologis itu, banjir menjadi bencana tahunan di Jambi.

KATA-KATA KUNCI

banjir; Jambi; ekologi; Sungai Batanghari

PENDAHULUAN

Sungai merupakan rupa bumi yang sangat dominan di Jambi. Sungai menjadi urat nadi bagi kehidupan masyarakat Jambi, sejak berabad-abad yang lalu hingga dewasa ini sungai Batanghari menjadi tempat masyarakat mandi, buang air, mencuci, dan irigasi (Asnan, 2019). Sumber mata air sungai Batanghari berada di daerah pegunungan dengan hutan basah, sumber mata air itu disebut hulu yang berada di daerah perbukitan dalam jajaran Pegunungan Bukit Barisan. Dan juga, sungai Batanghari dihimpun dari anak-anak sungai yang lebih kecil di daerah hulu. Anak-anak sungai itu diantaranya adalah Sungai Pijuan, Sungai Bulian, Sungai Batang Tembesi, Sungai Tabir, Sungai Batang Tebo, Sungai Pelaku, Sungai Batang Jujuhan, Sungai Sinabuan, dan Batang Pangea. Sungai Batang Tembesi memiliki anak sungai lagi yang disebut anak air, Sungai Tabir memiliki delapan belas anak air, Batang Tebo memiliki delapan anak air, Batang Jujuhan memiliki enam anak air (Asnan, 2019)

Sebelum masyarakat Jambi menggunakan jalan raya darat mereka menggunakan sungai sebagai jalan utama penghubung antar daerah, penggunaan jalan raya sungai yang makin intensif berbanding lurus dengan eksploitasi ekonomi maupun pergerakan manusia yang makin masif. Melalui sungai, penduduk pedalaman dapat mengangkut hasil sawah dan kebunnya ke hilir tanpa memerlukan banyak tenaga (Lapian, 2017). Sungai besar di wilayah timur Sumatera termasuk Batanghari memiliki jarak yang panjang antara hulu dan hilirnya, karakteristik sungainya berukuran lebih lebar, berair tenang, dan dalam (Asnan, 2019). Alih fungsi lahan di sepanjang bantaran Sungai Batanghari baik sebagai pemukiman maupun perkebunan membuat kondisi sungai Batanghari semakin buruk. Selain itu, penebangan hutan yang secara sembarangan di sepanjang aliran sungai telah menghilangkan daerah resapan air yang kemudian menyebabkan semakin tingginya debit air di sungai Batanghari.

Dengan hilangnya daerah resapan air itu, maka bantaran sungai yang sebelumnya ditopang akar menjadi lemah dan mudah longsor. Kemudian, tanah longsor itu terbawa arus dari hulu ke hilir yang mengakibatkan pendangkalan sungai. Kala musim kemarau, ukuran Sungai Batanghari bisa menyusut sampai setengah ukuran aslinya, penyusutan itu menghasilkan daratan baru, kemudian daratan yang baru timbul itu dimanfaatkan masyarakat untuk menanam padi. Jika musim hujan, Sungai Batanghari meluap hingga merendam pemukiman di sepanjang bantarnya. Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai membangun rumah panggung agar pada musim penghujan tidak terlalu terdampak air Sungai Batanghari yang meluap.

Alih fungsi lahan sepanjang bantaran Sungai Batanghari juga menjadi masalah serius. Hutan-hutan resapan yang ada di sepanjang Sungai Batanghari ditebang untuk diambil kayunya. Lahan itu kemudian digunakan untuk menanam tanaman ekonomis seperti karet dan sawit. Hal itu diperparah dengan kurang tegasnya peraturan mengenai batasan DAS (Daerah Aliran Sungai) membuat hilangnya daerah resapan di sepanjang Sungai Batanghari. Alih fungsi lahan dan kurang tegasnya kebijakan, memperparah pendangkalan kemudian menyebabkan rusaknya ekologi Sungai Batanghari. Selain itu, pencemaran juga menjadi isu penting. Sebab, masyarakat tidak hanya menggunakan sungai untuk beraktivitas seperti mandi, mencuci, dan lainnya tetapi masyarakat juga membuang limbah rumah tangganya ke sungai. Ditambah lagi, banyak pabrik-pabrik di sepanjang Sungai Batanghari yang

membuang limbah industri ke Sungai Batanghari. Dengan masifnya pembuangan limbah ke Sungai menyebabkan air Sungai Batanghari berbahaya untuk digunakan. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat atau pelaku industri untuk tidak membuang limbah di sungai merupakan faktor pendukung dalam pencemaran Sungai Batanghari.

Abainya pemerintah kolonial terhadap kondisi Sungai Batanghari diteruskan oleh pemerintah Republik. Terlebih lagi dengan beralihnya transportasi menggunakan jalan darat menyebabkan sungai mulai ditinggalkan. Dengan dibangunnya jalan ‘Trans-Sumatera’ maka perlahan-lahan sungai dilupakan dan perannya tidak diperhitungkan lagi. Pengabaian terhadap sungai Batanghari ini menyebabkan masalah seperti pendangkalan sungai, longsor, pencemaran, dan banjir yang semakin serius. Menurut arsip kolonial, banjir besar di Jambi telah terjadi sejak 1931 dan pada tahun 1955 terulang kembali dengan volume yang lebih besar dan dianggap sebagai banjir terbesar di Jambi dalam seratus tahun terakhir. Delapan puluh persen wilayah Jambi terendam banjir, 42 ribu hektar sawah siap panen hancur dan jumlah warga yang terkena dampak diperkirakan mencapai 35 ribu orang ([Emmer Courant, 1955](#)). Banjir tahun 1955 menjadi headline di banyak surat kabar berbahasa Belanda atau Indonesia.

Penelitian mengenai pemahaman akan pentingnya hubungan ekologi sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Contohnya adalah Gusti Asnan (2001), yang membahas mengenai perubahan kebudayaan maritim menuju kebudayaan daratan atau bisa disebut sebagai proses pelupaan sungai. Atau A. B Lopian (2009) yang juga memberi gambaran konseptual mengenai bagaimana negara Indonesia ini harusnya disebut sebagai negara kelautan, bukan kepulauan, karena luas laut yang melebihi luas daratan itu sendiri. Kesalahan konseptual dalam pemahaman melihat suatu lingkungan geografis ini kemudian menjadi titik berangkat permasalahan bahwa segala sesuatu mengenai hubungan manusia dan alam Indonesia harus diubah.

Banjir yang terjadi pada pertengahan abad ke-20 bukan hanya terjadi di Jambi, namun juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, salah satu diantaranya yaitu banjir yang terjadi di Surabaya pada tahun 1955. Husain, dalam penelitiannya yang berjudul ‘Banjir, Pengendaliannya, dan Partisipasi Masyarakat di Surabaya, 1950–1976’ menjelaskan bahwa banjir yang terjadi di Surabaya pada tahun 1955 disebabkan oleh meluapnya Kali Lamong, pembobolan tanggul Kali Pakis dan Kali Bratang Baru oleh masyarakat, dan sedimentasi kali, sampah, bangunan liar di bantaran kali, serta berkurangnya wilayah resapan air. Sedimentasi yang terjadi membuat Sungai Brantas tidak bisa menampung limpahan air dari anak-anak sungai dan selokan-selokan di sekitarnya, sehingga air meluap dan terjadilah banjir. Sama seperti yang terjadi di Jambi, banjir yang terjadi di Surabaya menimbulkan kerugian yang sangat besar. Sawah dan Ladang terendam, hingga ribuan penduduk mengungsi. Adapun upaya yang dilakukan oleh masyarakat Surabaya yang terdampak banjir yaitu dengan meninggikan bangunan rumah bagi mereka yang memiliki biaya. Sedangkan bagi yang tidak memiliki cukup biaya, mereka hanya membuat tanggul di depan pintu rumahnya ([Husain, 2016](#)).

Berbeda dengan yang terjadi di Batavia, dalam penelitiannya Mulyanto (2022) menjelaskan jika banjir yang terjadi pada abad ke-17 dan ke-18 bukan disebabkan oleh kelalaian masyarakat akan lingkungannya, melainkan disebabkan oleh ambisi pemerintah

kolonial untuk membuat Batavia menjadi seperti Amsterdam dengan dibangunnya kanal-kanal pada tahun 1600-an. Namun upaya itu tidak berhasil, dan justru menjadi penyebab banjir. Pembangunan kanal-kanal mengakibatkan pendangkalan sungai dan pencemaran air sungai. Pada tahun 1726 kanal-kanal diperdalam, namun tetap tidak membuahkan hasil. Sehingga, pada tahun 1808–1811 Batavia sebagai pusat pemerintahan dipindahkan ke Weltevreden.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menekankan pada penjelasan analitis kritis mengenai perubahan ekologi antara masyarakat Jambi dan sungai Batanghari yang disebabkan pesatnya pertumbuhan ekonomi pada abad XX dan abainya pemerintah dan masyarakat terhadap kondisi ekologis Sungai Batanghari. Batasan temporal dalam tulisan ini adalah sejak awal abad XX dimana imperialisme Belanda bercokol makin kuat dengan tumbangannya Kesultanan Jambi dan menyebabkan eksploitasi ekonomi di Jambi semakin masif dan berakhir pada banjir tahun 1955, yang mana telah dianggap sebagai bencana banjir terbesar di Jambi dalam pada abad ke-20. Mengkaji perubahan-perubahan fungsi dan perilaku masyarakat dan pemerintah kolonial terhadap Sungai Batanghari sehingga menyebabkan banjir tahun 1995.

METODE

Metode penelitian merupakan prosedur, cara atau teknik yang digunakan untuk melakukan penyelidikan dalam suatu disiplin ilmu untuk mendapatkan bahan-bahan yang akan diteliti. Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Termasuk kedalam proses menggali sumber, memberi penilaian, mengartikan dan menafsirkan fakta yang ada pada masa lampau yang kemudian dapat dianalisis dan dibuat kesimpulan mengenai suatu peristiwa (Gottschalk, 1986). Tahapan yang harus dilakukan menurut Kuntowijoyo dalam penelitian sejarah adalah : (1) pemilihan topik, (2) heuristik (pengumpulan sumber), (3) verifikasi (kritik sumber, keabsahan sumber), (4) interpretasi : analisis dan sintesis, dan (5) historiografi atau penulisan (Kuntowijoyo, 2018).

Pemilihan topik ini berangkat dari keingintahuan mengenai sejarah banjir di Jambi. Dari situ, peneliti mulai mencari sumber (heuristik) yang relevan dengan peristiwa banjir di Jambi tahun 1955 dan menemukan beberapa dokumen yang dirasa penting dan bisa dibagikan dalam bentuk analisis penelitian. Sumber primer didapatkan dari inventaris Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan juga surat kabar se-zaman. Sumber sekunder didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik banjir Jambi tahun 1955.

Selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber yang merupakan suatu kegiatan menilai sumber-sumber sejarah. Sumber yang ada diseleksi melalui kritik eksternal dan internal guna diperoleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Verifikasi dilakukan untuk menilai dan meneliti sumber-sumber sejarah yang ditemukan menyangkut dua macam, yakni otentik atau keaslian sumber dan kredibilitas yang sesuai dan bisa dipercaya atau tidaknya sumber tersebut. Setelah verifikasi kemudian dilakukan interpretasi yaitu proses analisis terhadap data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang ada untuk mendapatkan fakta. Langkah terakhir adalah historiografi atau penulisan, sebagai

tahap akhir dari seluruh prosedur penelitian sejarah. Setelah mengumpulkan sumber-sumber sejarah, kemudian verifikasi dan menafsirkan suatu informasi yang ada melalui interpretasi, selanjutnya menuliskan hasil penafsiran atau interpretasi itu sebagai sebuah karya sejarah dan mengedepankan aspek kronologis dengan mengurutkan suatu kejadian dalam kisah secara tematis, dan suatu rekonstruksi yang imajinatif dari masa lalu berdasarkan data yang diperoleh (Gottschalk, 1986).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sungai dan Jambi

Dalam sejarahnya, hampir semua pemukiman di Jambi dibangun di daerah yang memiliki hubungan dengan sungai. Air adalah penentu perkembangan kehidupan di Asia Tenggara, Jambi khususnya (Sutherland, 2007). Pemukiman di kawasan hulu lebih banyak dibandingkan dengan di kawasan hilir. Pemukiman yang banyak di hulu itu umumnya kecil atau setara dengan perkampungan. Sedangkan pemukiman di kawasan hilir umumnya lebih besar (Asnan, 2019). Pada masa klasik, hilir sungai Batanghari adalah wilayah pusat pemerintahan dan ekonomi. Pada masa kolonial, kawasan hilir itu berkembang menjadi pusat pemerintahan residen, dan di masa republik menjadi Ibu Kota Provinsi (saat ini Kota Jambi). Bahkan, dalam undang-undang di Jambi pada masa Kesultanan, Sungai memiliki peran sangat penting. Undang-undang adat Jambi yang kemudian saat ini menjadi slogan pemerintahan Provinsi Jambi yang berbunyi '*Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Batangnyo Alam Rajo*'. Yang dimaksud dengan sembilan lurah adalah sembilan anak sungai yang berada di Jambi yaitu:

1. Batang Merangin
2. Batang Mesumai
3. Sungai Tabir
4. Batang Pelepat
5. Batang Senamat
6. Batang Tebo
7. Batang Bungo
8. Batang Djudjuhan
9. Batang Abuan Tungkal

Dapat kita lihat dari situ bahwa sungai memiliki peran yang sangat penting baik dalam kehidupan sosial, budaya dan politik di Jambi. Seluruh daerah yang dilewati oleh sembilan sungai itu termasuk ke dalam Kesultanan Jambi dan patuh dalam Undang-Undang adat Jambi (Djawatan Penerangan Sumatera Tengah, t.t.). Sedangkan yang dimaksud dengan '*Batangnyo Alam Rajo*' adalah daerah teras Kesultanan Melayu Jambi yang terletak di daerah tanah pilih (Kota Jambi sekarang) dan berada di sebelah Sungai Batanghari (Yulita, 2020).

Sungai juga menjadi jalan raya sebelum diperkenalkannya jalan darat, karena transportasi sungai dianggap menjadi yang paling praktis sebagai penghubung daerah dataran tinggi dengan dataran rendah atau biasa disebut hulu dan hilir (Dick, 2022). Hubungan antara hulu dan hilir ini juga tidak hanya masalah perdagangan, namun juga politik (Andaya, 2016). Pusat pemerintahan yang berada di hilir agar lebih memudahkan

perdagangan dari daerah hulu ataupun daerah luar. Maka dari itu, lanskap politik di Jambi sejak masa klasik sampai modern menampilkan Sungai Batanghari sebagai faktor penting. Pentingnya faktor geografi dan geologi juga diungkapkan oleh (Colombijn, 2005), pengangkutan barang yang dilakukan melalui sungai menggunakan perahu atau rakit dapat lebih cepat mencapai tujuan dan memuat lebih banyak barang.

Sungai Batanghari sendiri tidak bisa dilepaskan dari peradaban Melayu Jambi, dikarenakan dari hulu ke hilir sungainya banyak menyimpan catatan sejarah yang berkaitan dengan Melayu. Sungai Batanghari yang menjadi saksi kebesaran Kerajaan Melayu, yang pada masanya merupakan Kerajaan yang disegani oleh Kerajaan disekitarnya (Yulita, 2020). Dalam berita Cina, pada abad ke-5 Masehi daerah aliran Sungai Batanghari disebutkan kaya akan barang-barang emas, perak, kapur barus dan lada. Berdasarkan berita I-Tsing, ketika mengunjungi Kerajaan Melayu pada tahun 672 dalam perjalanannya menuju Nalanda, ia melaporkan bahwa Daerah Melayu merupakan daerah yang maju. Setelah itu, kontak di daerah Jambi melalui Sungai Batanghari terus berkembang, seperti pada abad ke-13 Kerajaan Singasari melakukan ekspedisi Pamalayu dan kemudian mempengaruhi sosial dan politik Jambi dan efek dari pengaruh itu melekat sangat dalam dan dapat dilihat melalui penggunaan gelar dan nama-nama raja (Lindayanti et al., 2013).

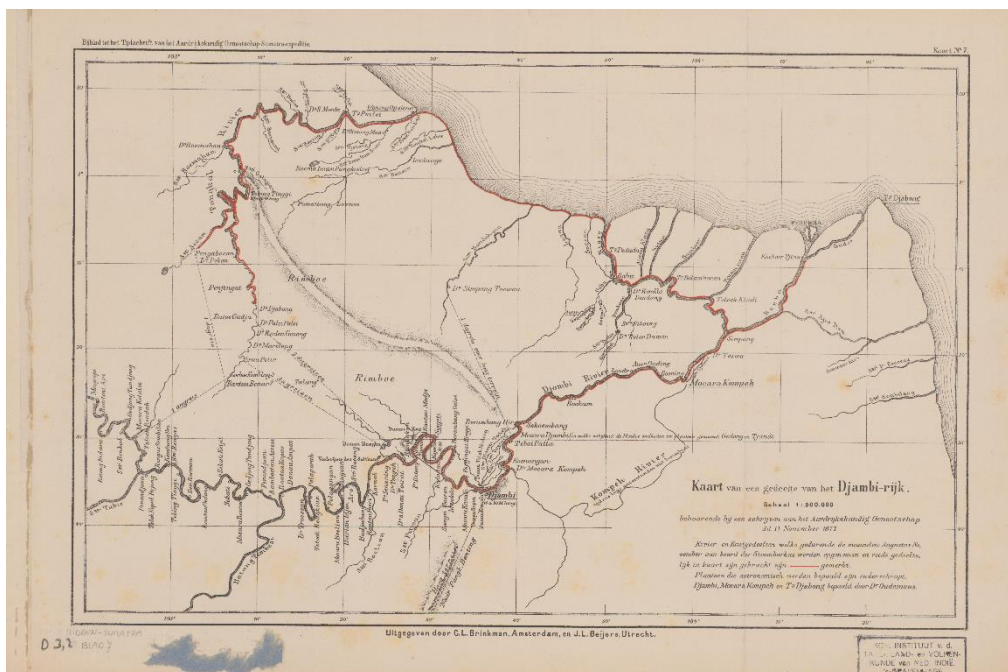


Foto 1. Peta aliran Sungai Batanghari di Jambi. Sumber: Aardrijkskundig Genootschap, (1879), KITLV. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:56425>

Dengan kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari sungai, rumah-rumah di Jambi dibangun dengan konsep rumah panggung, yang berfungsi menghindari luapan air sungai jika sedang musim hujan. Di tempat-tempat yang ketinggiannya tidak lebih dari 1 meter diatas permukaan laut, daerah rawa itu akan tergenang ketika air pasang atau musim hujan (Andaya, 2016). Selain itu, dengan meluapnya air sungai ini, ikan-ikan juga akan naik ke daratan sehingga menjadi berkah bagi masyarakat Jambi. Pendangkalan yang terjadi di Sungai Batanghari juga menumbuhkan suatu teknik pertanian yang unik bagi masyarakat

Jambi. Jika sedang musim kemarau, ukuran Sungai Batanghari akan mengecil sampai setengah ukurannya, di daratan yang baru muncul itu ditanami padi oleh masyarakat. Sampai sekarang, teknik bertani seperti ini masih dapat dijumpai di sepanjang Sungai Batanghari.

Sejarah hubungan ekologi di Jambi, menurut (Andaya, 2016) pada abad ke XVII dan XVIII masih seimbang. Perkembangan ekonomi dan kebijakan yang eksploitatif sejak awal abad XX setelah Belanda resmi berkuasa di Jambi menjadi salah satu faktor rusaknya ekologis Sungai Batanghari. Selain itu, pada dekade kedua abad 20, jalan raya darat mulai diperkenalkan dan digunakan sebagai sarana penghubung antar daerah. Pembangunan jalan ini direncanakan akan menghubungkan daerah hulu dan hilir (Asnan, 2001). Penebangan hutan yang sembarangan, alih fungsi DAS (Daerah Aliran Sungai) menjadi perkebunan atau persawahan. Umumnya, perkebunan yang dibangun sepanjang bantaran Sungai Batanghari adalah perkebunan karet dan sawit.



Foto 2. Pelabuhan Jambi di tepi Sungai Batanghari (Jambi), terlihat suasana bongkar muat barang, 8 Desember 1953.
Sumber: ANRI: *Kempen K 531208 DD 2*.

Pada masa kolonial, sungai menjadi sarana penyebaran pengaruh imperialisme. Seluruh hubungan pemerintah kolonial dengan Jambi dilakukan melalui transportasi sungai. Seperti dalam perang Jambi 1900–1907 antara kolonial Belanda dengan Kesultanan Jambi, sungai menjadi sarana penting pergerakan militer bagi kedua belah pihak. Ketika sungai telah dikuasai oleh pemerintah kolonial, maka lumpuhlah kehidupan perekonomian Jambi. Banyak laporan mengenai sungai Batanghari dari pemerintah kolonial baik yang digunakan untuk kepentingan ekonomi maupun militer. Laporan tersebut dapat dilihat dalam laporan ekspedisi atau memori serah jabatan. Jika perubahan lingkungan di sepanjang DAS Batanghari menjadi masalah utama rusaknya ekologi Sungai Batanghari.

Menurut Bambang Purwanto (1992), puncak kejayaan perkebunan di Jambi adalah tahun 1920-an dengan komoditi utama karet, masa itu biasa disebut *boom karet* atau *hujan emas*. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan karet dilakukan secara besar-besaran dan perkebunan karet dapat ditemui di hampir seluruh distrik di Jambi. Pendapatan Jambi dalam ekspor karet ini membawa ekonomi masyarakat Jambi ke taraf yang belum pernah dikenal sebelumnya (Zainuddin & Bachtiar, 1979). Hal inilah yang menyebabkan longsornya tanah

DAS Sungai Batanghari. Longsoran itu menyebabkan pendangkalan dan akhirnya menjadi sebab utama meluapnya air pada musim hujan. Senada dengan hal itu, laporan *Memorie Van Overgave* Residen Jambi tahun 1931, J.R.F. Verschoor van Nisse menyebutkan jika pendangkalan sungai menjadi masalah pelayaran, bahkan ketika kapal-kapal dapat melayari sungai, mereka harus melaju sangat pelan. Sebuah kapal kincir pada tahun 1920 bahkan membutuhkan waktu sampai 48 jam untuk menempuh jarak sekitar 100 km dari Kota Jambi ke Muara Tembesi* ([ANRI. Algemene Secretarie Serie Grote Bundel Ter Zijde Gelegde Agenda 1891-1942 jilid II](#)). Tidak ada data mengenai besarnya banjir tahun 1931 dan akumulasi kerugiannya, namun dapat dilihat dari laporan dari Residen Jambi J.R.F. Verschoor van Nisse bahwa penyebab banjir tahun 1931 salah satunya adalah pendangkalan di Sungai Batanghari.



Foto 3. Banjir di Jambi, circa 1931.

Sumber: KITLV A1142,([t.t.](#)),
<http://hdl.handle.net/1887.1/item:895100>

Kebijakan eksploitatif tanpa memandang peran Sungai Batanghari itu diteruskan lagi oleh Pemerintah Republik Indonesia setelah merdeka tahun 1945. Pembabatan hutan tidak memberi tanda penurunan. Industri *furniture* di daerah hilir membutuhkan kayu dari daerah hulu, selain itu industri pertambangan juga berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan industri dianggap sebagai sebuah pertanda baik bagi perkembangan ekonomi suatu daerah. Namun, tanpa melihat resiko dan dampak yang akan dirasakan kemudian hanya akan menimbulkan bencana. Tidak ada angka pasti berapa luas hutan yang ditebang sejak zaman kolonial sampai banjir tahun 1955 namun, sebuah pemahaman akan faktor kausalitas dalam hubungan ekologis antara manusia dan Sungai Batanghari dapat menjadi sebuah pemahaman akan pentingnya harmonisasi hubungan manusia dengan alam. Akumulasi dari kegiatan industri eksploitatif yang terjadi di sepanjang aliran sungai tentu menjadi faktor kunci dari rusaknya ekologi Sungai Batanghari itu.

* *Memorie van Overgave Resident Djambi J.R.F Verschoor van Nisee 1931-1932* dalam, ANRI, Algemene Secretarie Serie Grote Bundel Ter Zijde Gelegde Agenda 1891-1942 jilid II. No. 8677.

Selain permasalahan penebangan hutan yang marak ada juga alih fungsi lahan menjadi pertambangan. Sejarah eksplorasi pertambangan di Jambi sudah terjadi sejak tahun 1843. Seorang pengelana asal Amerika bernama Gibson telah mendapatkan izin dari Kesultanan Jambi untuk melakukan eksploitasi batu bara di Jambi. Namun, eksploitasi itu tidak sampai dilakukan karena Gibson ditangkap oleh Pemerintah Hindia Belanda karena surat perjanjian itu dianggap surat persekongkolan untuk melawan otoritas Pemerintah Hindia Belanda (Scholten, 2008). Setelah itu, eksplorasi tambang di Jambi diteruskan oleh pengusaha dari Belanda bernama Schoww Sandvoort pada tahun 1877. Setelah menghadap Sultan, upaya Sandvoort tidak mudah untuk mendapatkan batu bara di Jambi karena mendapat perlawanan dari masyarakat (*Provinciale Drentsche en Asser Courant, 1877*).

2. Banjir 1955

Hasil dari rusaknya hubungan ekologis antara manusia dan Sungai Batanghari tentunya membawa dampak. Banjir tahun 1955 disebut lebih dahsyat dari banjir tahun 1931, terjadi karena hujan mengguyur Jambi selama sepuluh hari dan Sungai Batanghari tak mampu lagi menampung debit air hujan yang ada (Kajanglako, 2020). Banjir di Jambi itu menjadi headline di berbagai surat kabar baik yang berbahasa Indonesia ataupun Belanda. Menimbulkan keprihatinan luas dari kalangan masyarakat luar Jambi. Sepanjang abad ke-XX, Sungai Batanghari rutin memiliki agenda tahunan yaitu banjir. Menurut arsip kolonial, banjir besar di Jambi telah terjadi sejak 1931 dan banjir tahun 1955 terulang kembali dengan volume yang lebih besar dan disebut sebagai banjir terbesar di Jambi dalam abad XX.



Foto 4. Kayu-kayu balok dari hutan dikumpulkan di tepi sungai Batanghari sebelum dihanyutkan ke pabrik di Kota Jambi, 1 Desember 1953.

Sumber: (ANRI), *Kempen 531201 DD 10*

Komando Teritorial II/Sriwijaya, Kolonel Bambang Utoyo menyatakan bahwa banjir yang sedang terjadi di Jambi merupakan bencana nasional dan menjadi bencana banjir yang terburuk dalam kurun waktu seratus tahun terakhir (Java Bode, 1955a). Pada banjir tahun 1955, 80 persen wilayah Jambi terendam banjir, 42 ribu hektar sawah siap panen hancur. Jumlah warga yang terkena dampak diperkirakan mencapai 350 ribu orang dan 5 orang meninggal dunia. Jalan-jalan dari daerah luar kota menuju Kota Jambi terputus, jalan lintas yang menghubungkan Palembang dengan Jambi atau Bukittinggi dengan Jambi juga ikut

terputus akibat genangan air yang mencapai 4 meter hal itu menyebabkan putusnya sarana transportasi dan komunikasi antara Jambi dengan daerah lain (Emmer Courant, 1955). Sjamsoe Bahroen melaporkan hujan melanda Jambi sejak 28 Januari 1955 dan berlangsung selama sepuluh hari, akibatnya Sungai Batanghari tak mampu menahan debit air itu dan di Muara Tembesi dilaporkan bahwa ketinggian air mencapai empat meter.



Foto 5. Pompa bensin dan daerah perniagaan di Jalan Batanghari terendam banjir, terlihat masyarakat menggunakan perahu untuk mengungsi, 18 Februari 1955.

Sumber: (ANRI), *Kempen KR 550218 FG 3-6*

Dengan begitu, Dewan Eksekutif Dewan Kabupaten Batanghari menunjuk dua wakil yaitu Sjamsoe Bahroen dan Dachlan untuk berangkat ke Jakarta menemui pemerintah pusat terkait dengan banjir di Jambi. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan seperti obat-obatan, pangan dan juga pakaian. Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi mengirimkan bantuan 1.700 ton beras dan juga akan mengirimkan bantuan berupa pakaian dan obat-obatan. Selain itu Palang Merah juga memberikan bantuan dan mengajak dukungan seluruh penduduk Indonesia membantu Jambi yang sedang dilanda musibah banjir. Total pengungsi di Jambi sendiri diperkirakan mencapai 80–100 ribu orang (Java Bode, 1955b). Karena tergenangnya jalan darat, maka proses pemberian bantuan itu dikirim melalui pesawat dan dibagikan secara langsung menggunakan perahu. Ada pula laporan bahwa pemberian bantuan itu dijatuhkan dari pesawat terbang oleh TNI AU (De Waarheid, 1955).

Perdana Menteri yang menjabat saat itu, Ali Sastromidjojo mendatangi Jambi pada tanggal 16 Februari 1955, dengan menggunakan pesawat terbang untuk melihat secara langsung kondisi banjir di Jambi. Kunjungan ini diberitakan oleh surat kabar *Nieuwsblad* 18 Februari dan *Overijssels Dagblad* 17 Februari. Ribuan orang tinggal di atas loteng rumahnya, yang rumahnya tenggelam sepenuhnya, mereka mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Kondisi psikologis manusia biasanya menjadi tertekan apabila terjadi sesuatu yang diluar dugaan mereka, seperti terjadi bencana (Tias et al., 2023). Pada banjir di Jambi tahun 1955, para masyarakat yang terdampak selain memikirkan untuk mengamankan harta benda juga diharuskan hati-hati karena adanya ancaman bahaya harimau yang berkeliaran, karena banjir harimau juga ikut mengungsi dan menyerang hewan-hewan ternak masyarakat.

Setelah banjir tahun 1955 selesai, tidak ada kabar mengenai normalisasi Sungai Batanghari. Banjir menjadi bencana tahunan bagi masyarakat yang tinggal di tepi Sungai Batanghari. Eksploitasi di daerah hulu ataupun hilir tidak memiliki tanda penurunan, pembukaan lahan untuk perkebunan atau pertambangan terus terjadi hingga hari ini. Bukti dari makin rusaknya ekologi Sungai Batanghari itu terjadi tahun 2003, menurut laporan 2.000 lebih desa dan kelurahan tergenang air. Bahkan musibah banjir yang melanda Jambi saat itu diperkirakan menyamai banjir pada tahun 1955. Tidak hanya itu, dampak dari banjir tahun 2003 itu telah membuat ekonomi Provinsi Jambi terganggu, menenggelamkan kurang lebih 30 unit gedung sekolah, sehingga proses belajar mengajar terhenti. Penyebab banjir itu diperkirakan berasal dari para penebang kayu ilegal atau (*illegal logging*) (Tempo, 2003).

3. Respon Masyarakat

Ketergantungan masyarakat Jambi dengan alam namun tidak memperhatikan keseimbangan ekologis yang pada akhirnya membuat rusaknya kondisi Sungai Batanghari. Hal itu menyebabkan terjadinya pendangkalan dan semakin meluasnya sedimentasi yang kemudian menjadi faktor utama banjir tahun 1955. Pada dasarnya masyarakat Jambi sudah terbiasa dengan meluapnya air Sungai Batanghari. Hubungan masyarakat Jambi dengan sungai Batanghari begitu dalam, hal itu dapat kita lihat dari kebudayaan yang berkembang, dimana mereka membangun rumah panggung sebagai upaya menghadapi luapan air Sungai Batanghari. Namun, banjir yang terjadi pada tahun 1955 begitu besar hingga menenggelamkan rumah-rumah masyarakat. Hal itu memaksa masyarakat Jambi untuk mengungsi pada wilayah yang lebih tinggi.

Meskipun masyarakat Jambi mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi saat terjadinya banjir, mereka tidak menetap di tempat itu. Ketika air banjir telah surut, mereka akan kembali ke rumahnya masing-masing. Hal itu dikarenakan mereka telah terbiasa hidup di bantaran Sungai Batanghari, dengan segala kondisi dan kegiatan yang biasa mereka lakukan. Hal ini dapat kita kaitkan juga dengan sumber perekonomian masyarakat Jambi, masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Batanghari hidup dari hasil menangkap ikan, bertani, mengumpulkan hasil hutan, dan berdagang (Andaya, 2019). Kelompok masyarakat agraris ini mengandalkan Sungai Batanghari sebagai sumber pengairan bagi ladang dan sawah mereka.

Selain itu, ada pula kelompok nelayan yang bergantung pada Sungai Batanghari sebagai sumber penangkapan ikan. Sungai Batanghari dengan anak sungainya memiliki ragam spesies ikan tawar yang beragam (Yusmiono & Januardi, 2019). Penangkapan ikan boleh dilakukan oleh siapapun, artinya tidak ada badan air atas kepemilikan seseorang. Pada kondisi sungai saat musim banjir, stok ikan melimpah di Sungai Batanghari. Sebaliknya, saat musim kemarau persediaan ikan sangat sedikit (Hoggarth et al., 1996). Jika sedang musim kemarau, ukuran Sungai Batanghari akan mengecil sampai setengah ukurannya, di daratan yang baru muncul itu ditanami padi oleh masyarakat dan menjadi alternatif bagi nelayan yang tidak dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan optimal. Sampai sekarang, teknik bertani seperti ini masih dapat dijumpai di sepanjang Sungai Batanghari.

Gambaran dari ketergantungan masyarakat Jambi terhadap Sungai Batanghari sekaligus dampak dari banjir tahun 1955 dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Karmela (2021), mengenai industri gula aren di Desa Pulau Mentaro dengan menggunakan sumber lisan, bahwa banjir Sungai Batanghari yang terjadi pada tahun 1955 menjadi faktor penurunan dalam perkembangan industri gula aren. Dengan posisi perkebunan yang berada tidak jauh dari Sungai Batanghari dan Sungai Kumpeh membuat hampir semua kebun aren terendam banjir pada tahun 1955, sehingga banyak pohon aren (pohon enau) dan tanaman lainnya yang mati karena bencana banjir tersebut. Setelah banjir surut dan kondisi telah pulih, masyarakat mulai kembali menanam dan membudidayakan pohon aren dan tanaman lainnya yang dapat berproduksi mulai 7 sampai 10 tahun.



Foto 6. Anak-anak yang harus diungsikan menggunakan perahu ke tempat yang tidak terkena banjir akibat meluapnya Sungai Batanghari, Jambi, 18 Februari 1955.

Sumber: (ANRI), *Kempen KR 550218 FG 3-17*

Dari penelitian itu, dapat kita simpulkan jika segala roda perekonomian yang berada di sepanjang Sungai Batanghari dan terdampak banjir tahun 1955 mengalami kerugian. Namun, letak yang strategis itu membuat masyarakat tidak bisa meninggalkan tempat tinggalnya dan sumber ekonominya yang kebanyakan bergantung kepada Sungai Batanghari, baik sebagai sumber pengairan ataupun sumber mencari ikan. Masyarakat Jambi telah dihadapkan pada kondisi dimana pengabaian terhadap hubungan ekologis Sungai Batanghari telah membawa mereka ke tingkat kerugian yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Setelah banjir tahun 1955, rakyat Jambi memiliki agenda tahunan yakni banjir dan proses pengabaian Sungai Batanghari terus berlanjut hingga hari ini tanpa menunjukkan penurunan.

Tidak ada sumber tertulis yang menyatakan secara pasti bagaimana kondisi masyarakat Jambi setelah terjadinya banjir pada tahun 1955. Namun, jika merujuk pada pernyataan yang telah dituliskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat tetap melakukan aktivitas sosial dan perekonomiannya di wilayah asalnya. Perkebunan, ladang, dan sawah yang rusak akibat terjadinya banjir, ditanam kembali setelah kondisi pulih setelah terjadinya banjir. Bagaimanapun, banjir tahun 1955 tidak membuat putusya keterikatan masyarakat Jambi dengan Sungai Batanghari dalam hal ekonomis. Dalam hal

hubungan ekologis, banjir tahunan yang terjadi di Jambi menjadi bukti nyata dari pengabaian dan buruknya pengelolaan Sungai Batanghari. Terlebih lagi, dalam hal sosial dan kebudayaan, pengabaian dan buruknya pengelolaan Sungai Batanghari itu adalah bukti hilangnya nilai-nilai luhur yang telah berkembang sejak lama.

KESIMPULAN

Sungai Batanghari adalah urat nadi masyarakat Jambi selama berabad-abad. Hubungan antara masyarakat hulu dan hilir sungai dilakukan melalui jalan raya sungai karena saat itu jalan darat belum dibangun. Eksploitasi di sepanjang bantaran Sungai Batanghari berlangsung masif sejak awal abad ke XX. Praktik penebangan liar dan pembukaan perkebunan karet besar-besaran yang terjadi pada awal abad ke-20, menjadikan bantaran Sungai Batanghari longsor dan mengakibatkan pendangkalan sungai itu sendiri. Hal itu yang kemudian menjadi sebab banjir yang terjadi tahun 1931 dan 1955. Banjir tahun 1955 disebut sebagai banjir terbesar abad-20, 80 persen wilayah Jambi terdampak banjir dan sekitar 350.000 orang yang terdampak banjir. Perkebunan dan persawahan gagal panen akibat banjir itu. Pemerintah Jambi pergi ke Jakarta untuk meminta bantuan untuk para masyarakat Jambi yang terdampak banjir. Sebanyak 170.000 ton beras diberikan pemerintah melalui Kementerian Ekonomi dan juga bantuan datang dari Palang Merah Indonesia yang bergotong royong membantu masyarakat yang terdampak.

Banjir di Jambi tahun 1955 membawa kerugian jiwa, materil, dan lainnya dengan jumlah yang tak terhingga. Belum ada laporan mengenai total kerugian materil banjir tahun 1955. Selain itu, banjir 1955 di Jambi juga membuktikan telah rusaknya hubungan ekologis antara manusia dan Sungai Batanghari. Peran sungai telah dilupakan sejak diperkenalkannya jalur darat. Budaya masyarakat sungai telah banyak hilang akibat perubahan itu. Ditambah juga peran pemerintah yang abai terhadap Sungai Batanghari, tidak adanya kebijakan yang jelas mengenai penggunaan sungai atau penggunaan lahan di DAS Sungai Batanghari membuat kerusakan sungai tak dapat dihindari. Banjir Jambi tahun 1955 adalah konsekuensi logis dari abainya manusia terhadap peran Sungai dalam hubungan ekologis.

DAFTAR RUJUKAN

- Aardrijkskundig Genootschap, K. bij de S. E. (1879). *KITLV*.
- Andaya, B. W. (2016). *Hidup bersaudara Sumatra Tenggara pada Abad XVII dan XVIII*. Penerbit Ombak.
- ANRI. (t.t.-a). *Algemene secretarie serie grote bundel ter zijde gelegde agenda 1891-1942 Jilid II. No. 8677*.
- ANRI. (t.t.-b). *Kementrian penerangan wilayah Sumatera Selatan 1950-1967*.
- Asnan, G. (2001). Dari sungai ke jalan raya: perubahan sosial-ekonomi di daerah perbatasan Sumbar-Riau pada awal Abad XX. Dalam E. Sedyawati & S. Zuhdi (Ed.), *Arung samudera, persembahan memperingati Sembilan Windu A.B Lopian* (hlm. 323–338). Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Universitas Indonesia.
- Asnan, G. (2019). *Sungai & sejarah Sumatera*. Penerbit Ombak.

- Colombijn, F. (2005). A Moving History of Middle Sumatra, 1600-1870. *Modern Asian Studies*, 39(1), 1-38.
- De Waarheid. (1955, Februari 8). *Grote overstromingsramp op Sumatra*.
- Dick, H. (2022). Water World to Inundation River Cities in Southeast Asia, From Old to New Millenium. Dalam R. Padawangi, P. Rabe, & A. Perkasa (Ed.), *River Cities in Asia* (hlm. 37-56). Amsterdam University Press.
- Djawatan Penerangan Sumatera Tengah. (t.t.). *Propinsi Sumatera Tengah*. Kementerian Penerangan.
- Emmer Courant. (1955, Februari 18). *De rampsituatie op Djambi*.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti sejarah*. UI Press.
- Hoggarth, D. D., Cowan, J., Halls, A. S., McGregor, J. A., Garaway, C. A., Payne, A. I., & Welcomme, R. L. (1996). *Management guidelines for asian floodplain river fisheries part 2: Summary of DFID Research*. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS.
- Husain, S. B. (2016). Banjir, pengendaliannya, dan partisipasi masyarakat di Surabaya, 1950-1976. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 18(1).
- Java Bode. (1955a, Februari 7). *Overstromingen in Djambi nationale ramp*.
- Java Bode. (1955b, Februari 17). *Circa 50.000 ha rijstvelden door overstromingen vernield*.
- Kajanglako. (2020, Juni 15). *Banjir terbesar Jambi tahun 1955*.
- KITLV A1142. (t.t.). *Overstroming te Djambi, (Circa 1931)*.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
- Lapian, A. B. (2017). *Pelayaran dan perniagaan Nusantara abad ke-16 dan 17*. Komunitas Bambu.
- Lindayanti, Noor, J. T., & Hariadi, U. (2013). *Jambi dalam sejarah 1500-1942*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Minangkabau Press.
- Mulyanto, H. (2022). Perkembangan kanal OUD Batavia abad XVII-XX: Tinjauan Sejarah Perkotaan. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 12(3).
- Provinciale Drentsche en Asser Courant. (1877, Desember 17). *Binnenland*.
- Purwanto, B. (1992). *From dusun to the market: native rubber cultivation in Southern Sumatra, 1890-1940* [Ph,D dissertation]. University of London.
- Scholten, E. L. (2008). *Kesultanan Sumatera dan negara kolonial hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan bangkitnya imperialisme Belanda*. KITLV; Banana.
- Susilawati, & Karmela, S. H. (2021). Sejarah industri gula aren di Desa Pulau Mentaro Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Tahun 1980-2010. *Jurnal Istorica*, 5(2), 40-52.
- Sutherland, H. (2007). Geography as destiny? The role of water in Southeast Asian history. Dalam P. Boomgard (Ed.), *A World of Water: Rain, Rivers and Seas in Southeast Asian Histories* (hlm. 27-70). KITLV Press.
- Tempo. (2003, Desember 15). *Separuh wilayah Jambi terendam banjir*.

- Tias, A. A. N., Ridhoi, R., & Lutfi, I. (2023). Sejarah erupsi Semeru 1994 dan upaya penanganannya di Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. *Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, 17(1)*, 26–42.
- Yulita, O. (2020). Peran Sungai Batanghari terhadap perekonomian Kesultanan Melayu Jambi. *Hadharah: Jurnal Keislaman dan Peradaban, 14(1)*, 97–109.
- Yusmiono, B. A., & Januardi, J. (2019). Mata pencarian penduduk Sungai Batanghari Sembilan di Provinsi Sumatera Selatan. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi), 7(2)*. <https://doi.org/10.24127/pro.v7i2.2523>
- Zainuddin, & Bachtiar A.S. (1979). *Sejarah kebangkitan nasional daerah Jambi*. Depdikbud.